

**REPRESENTASI SIKAP PEJABAT PEMERINTAH PUSAT TERKAIT
KONTROVERSI PONDOK PESANTREN AL ZAYTUN:
KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS
(Representation of The Central Government Officials Attitude Regarding The
Controversy of Al Zaytun Islamic Boarding School:
A Critical Discourse Analysis Study)**

**Santuso, Sukarno, & Albert Tallapessy
Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37 Tegalboto, Sumpalsari, Jember, Indonesia
Pos-el: santuso@yahoo.com**

(Diterima: 2 Juli 2024; Direvisi: 26 Juli 2024; Disetujui: 1 Oktober 2024)

Abstract

The mass media employs various methods to influence and direct the public towards perspectives that align with their own interests. This research aims to uncover the attitudes of central government officials regarding the controversy surrounding Al Zaytun Islamic Boarding School. This study is a critical qualitative descriptive research. The data consists of linguistic data, including vocabulary, modality, metaphors, and sentences that represent the attitudes of central government officials. The source of the data is kompas.com. Data collection was carried out using the observation method, analyzing 9 news texts published between June 15 and August 31, 2023. Data analysis used Norman Fairclough's CDA theory, divided into three dimensions: textual analysis, discourse practice, and sociocultural practice. The results of this study indicate that in the textual analysis dimension, kompas.com represented central government officials as cautious, indecisive, uncertain, subjective, hesitant, and slow in responding to the case at Al Zaytun, but firm in protecting the existence of the boarding school. In the discourse practice dimension, it was found that kompas.com aims to shape public opinion that Al Zaytun should not be dissolved. As for the sociocultural practice dimension, the news coverage related to the controversy of Al Zaytun cannot be separated from situational, institutional, and social contexts.

Keywords: CDA, mass media, Norman Fairclough, kompas.com, Panji Gumilang

Abstrak

Media massa melakukan berbagai cara dalam memengaruhi dan mengarahkan publik pada perspektif yang sejalan dengan kepentingan media itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sikap pejabat pemerintah pusat terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif kritis. Data penelitian ini berupa data lingual yang terdiri atas kosakata, modalitas, metafora, dan kalimat yang merepresentasikan sikap pejabat pemerintah pusat. Sumber data penelitian ini berasal dari kompas.com. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan mengambil sembilan teks berita yang terbit antara 15 Juni–31 Agustus 2023. Analisis data menggunakan teori AWK model Norman Fairclough yang dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu analisis tekstual, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada analisis tekstual, kompas.com merepresentasikan pejabat pemerintah pusat dengan sikap kehati-hatian, tidak tegas, tidak pasti, subjektif, ragu-ragu, dan lamban dalam merespons kasus di Al Zaytun, tetapi tegas dalam melindungi eksistensi ponpes tersebut. Pada dimensi praktik kewacanaan, diketahui bahwa kompas.com ingin membentuk pandangan masyarakat bahwa Ponpes Al Zaytun tidak perlu dibubarkan. Adapun pada dimensi praktik sosiokultural, pemberitaan yang menyangkut kontroversi Ponpes Al Zaytun tidak terlepas dari konteks situasional, institusional, dan sosial.

Kata kunci: AWK, media massa, Norman Fairclough, *kompas.com*, Panji Gumilang

DOI: 10.26499/jk.v20i2.7717

How to cite: Santuso, Sukarno, & Tallapessy, A. (2024). Representasi sikap pejabat pemerintah pusat terkait kontroversi pondok pesantren Al Zaytun: Kajian analisis wacana kritis. *Kandai*, 20(2), 272-290 (DOI: 10.26499/jk.v20i2.7717)

PENDAHULUAN

Media massa memiliki peran besar dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat tentang dunia. Media massa dapat merepresentasikan citra individu atau kelompok dengan cara yang positif atau negatif, tergantung pada sudut pandang yang diambil oleh media massa tersebut (Silfia & Kurniawan, 2022).

Lebih lanjut, Romadlan & Fauziah (2022) mengungkapkan bahwa pekerjaan utama media massa ialah mengonstruksi berbagai realitas. Realitas tersebut tidak hanya dikonstruksi, tetapi juga diatur, diarahkan, dan dikontrol sesuai dengan ideologi media (Nurjannah & Sonni, 2021). Oleh sebab itu, berita yang dihasilkan oleh media massa tidak selalu mengandung kebenaran secara mutlak (Saumantri & Zikrillah, 2020).

Salah satu contoh konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa terlihat pada pemberitaan seputar kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun pada Juni 2023 lalu. Ponpes tersebut pada awalnya menjadi perbincangan warganet karena unggahan video yang menunjukkan tata cara ibadah salat idulfitri 1444 H yang tidak lazim. Dalam video itu, terlihat bahwa saf laki-laki dan perempuan bercampur baur. Bahkan, terlihat seorang perempuan berdiri di depan saf laki-laki.

Perbincangan warganet semakin berkembang setelah pimpinan Ponpes Al Zaytun, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, membuat pernyataan yang kontroversial dengan menyatakan bahwa seorang wanita boleh menjadi khatib salat Jumat. Panji juga mengemukakan bahwa

Al-Qur'an adalah kalam Nabi Muhammad saw., bukan kalam Allah Swt. (Wiryo, 2023). Selain itu, dia juga membuat beberapa pernyataan kontroversial lainnya.

Pernyataan kontroversial tersebut banyak diliput oleh media massa, salah satunya ialah *kompas.com*. Dalam meliput berita, *kompas.com* menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan tanggapan sekaligus sikap atas kontroversi Ponpes Al Zaytun. Salah satu kelompok narasumber yang banyak diliput ialah dari kalangan pejabat pemerintah pusat. Mereka menyatakan sikap terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun.

Hal yang perlu disadari ialah bahwa wartawan dalam memberitakan suatu peristiwa menyesuaikan dengan arah dan tujuan perusahaan media massa yang menaunginya (Hidayat, Chatra, & Arif, 2020). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Cory (dalam Santuso, Wibisono, & Sukarno, 2023) bahwa media massa melakukan berbagai cara dalam memengaruhi dan mengarahkan publik pada sudut pandang yang segaris dengan ideologi media. Dalam perspektif kritis, media massa dipandang sebagai alat bagi kelompok dominan untuk memanipulasi dan mengukuhkan kehadirannya sambil memarjinalkan kelompok lain yang tidak dominan (Cahyana, 2022). Bahkan, media massa juga dapat memengaruhi kelompok minoritas untuk mengadopsi ideologi yang diusung oleh kelompok dominan (Mulyana & Irfan, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *kompas.com* tidak sekadar memberitakan kontroversi

Ponpes Al Zaytun dengan apa adanya. *Kompas.com* tentunya telah melakukan konstruksi realitas dengan merepresentasikan sikap narasumber dari kalangan pejabat pemerintah pusat dengan cara tertentu. Perepresentasian sikap disesuaikan dengan kepentingan media massa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fitur-fitur kebahasaan yang didayagunakan *kompas.com*; serta mengungkap praktik kewacanaan dan praktik sosiokultural yang dilakukan *kompas.com* dalam merepresentasikan sikap pejabat pemerintah pusat terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun. Penelitian ini memilih topik kasus Al Zaytun karena kontroversinya yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyimpangan ajaran keagamaan, kasus kriminal, hingga reaksi publik, menjadikannya contoh yang relevan untuk mengkaji strategi media massa melakukan konstruksi realitas dan representasi sikap. Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa media massa apa pun memiliki kepentingan sehingga dalam melakukan pemberitaan tidak selalu netral.

Studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa pihak.

Pertama, Muthaqin, Syam, & Wahyuni (2021) meneliti ideologi media dan pembingkai pada pemberitaan perusakan musala di Minahasa Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *kompas.com* memberitakan peristiwa tersebut dengan penulisan gaya aman dan perspektif berita yang sempit.

Kedua, Novelty, Madya, & Manaf (2021) meneliti representasi pejabat pemerintah terhadap kebijakan karantina wilayah pada tayangan *ILC Tv One*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) pejabat pemerintah pusat dan juru bicara presiden terlihat tidak mampu

membuat keputusan yang kuat dan hanya memberikan penjelasan edukatif mengenai konsep pembatasan sosial dan karantina wilayah, dan (2) wakil rakyat dan pakar mengkritik bahwa kebijakan pemerintah belum mencapai hasil maksimal dan kurang memiliki ketegasan.

Ketiga, Suryawati & Jamalullail (2021) meneliti berita keputusan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh *kompas.com*. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa *kompas.com* memandang FPI sebagai pihak yang bersalah dan menganggap keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama (SKB) sebagai langkah yang tepat. Dengan jelas terlihat bahwa *kompas.com* bersikap mendukung pemerintah.

Keempat, Zainuddin, Darwis, & Iswary (2021) meneliti representasi ideologi media *Kompas* di balik wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa media *Kompas* merepresentasikan keberpihakan pada pasangan calon dan wakil calon presiden nomor urut 1 yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Di balik itu, *Kompas* merepresentasikan penentangannya kepada calon dan wakil calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Berdasarkan tinjauan studi terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu berfokus pada analisis representasi media terhadap individu atau kelompok tertentu dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang mengungkap pernyataan-pernyataan yang menunjukkan sikap pejabat pemerintah

pusat dalam menanggapi kasus kontroversi Ponpes Al Zaytun.

Dengan meneliti hal tersebut di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada khalayak tentang pentingnya berpikir kritis terhadap teks berita sehingga tidak mudah salah paham, memercayai berita begitu saja, dan bahkan sampai terprovokasi oleh isu-isu yang dikonstruksi oleh media massa. Di samping itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan metode dalam analisis wacana kritis, khususnya dalam konteks representasi media. Dengan menganalisis cara media massa merepresentasikan sikap pejabat pemerintah, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang teknik-teknik dan strategi-strategi bahasa yang digunakan dalam konstruksi realitas oleh media.

LANDASAN TEORI

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan suatu pendekatan yang tidak sekadar menganalisis kata-kata dalam sebuah teks, tetapi menganalisis bahasa secara kritis sebagai praktik sosial untuk mengekspresikan ideologi dan relasi kekuasaan dalam konteks sosial (Aji, Sudono, Sutarsih, & Utami, 2022; Sakka, Nurhadi, & Sari, 2023). Di samping itu, AWK juga menganalisis segala bentuk ketidakseimbangan sosial yang direpresentasikan melalui bahasa (Ahmadi F & Mahardika, 2019; Febriyanti & Suyudi, 2022).

Salah satu tokoh yang mengembangkan AWK ialah Norman Fairclough. Model Fairclough mengimplikasikan adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial (Supriadi, Simanihuruk, & Yusrah, 2020). Hal ini berarti wacana tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga terkait dengan struktur sosial, seperti kelas dan

relasi sosial. Metode AWK model Fairclough terbagi ke dalam tiga dimensi, yaitu teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural (Fairclough, 2010: 132). Dimensi pertama merupakan tahap deskripsi. Dalam dimensi ini, analisis dilakukan terhadap berbagai aspek linguistik yang meliputi kosakata, modalitas, metafora, dan kalimat.

Kosakata adalah kumpulan kata-kata yang digunakan dalam suatu bahasa untuk menyampaikan makna dan ide (Wilson & Sutrisno, 2022). Modalitas merujuk pada kemampuan bahasa untuk menyampaikan sikap penutur terhadap kebenaran atau kepastian suatu pernyataan (Kulup, Yulianto, & Yohanes, 2021). Modalitas berkontribusi pada sikap subjektif dalam komunikasi verbal. Chaer (2014: 262–263) mengklasifikasikan modalitas menjadi empat macam, yaitu (a) modalitas intensional yang mengungkapkan harapan, permintaan, keinginan, atau ajakan; (b) modalitas epistemik yang menunjukkan kepastian, kemungkinan, dan keharusan; (c) modalitas deontik yang menyatakan persetujuan, perintah, atau larangan; dan (d) modalitas dinamik yang menyatakan kesanggupan.

Metafora merupakan bentuk analogi yang langsung membandingkan dua hal secara singkat atau dapat juga diartikan sebagai simbolisasi, yaitu penggantian suatu ungkapan dengan tanda lain yang memiliki kemiripan analogi (Prayogi & Oktavianti, 2020; Wicaksono dkk., 2018: 184–185). Metafora menciptakan ekspresi yang unik dan kreatif serta akan menghasilkan makna mendalam. Adapun kalimat, Abriana & Yaqin (2019) mendefinisikannya sebagai satuan gramatikal terbesar yang mengandung unsur subjek dan predikat serta mampu mengungkapkan suatu ide atau pikiran. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai dengan intonasi akhir. Dalam wujud

tulisan, kalimat diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca.

Dimensi kedua merupakan tahap interpretasi. Dalam dimensi ini, fokus diberikan pada proses interpretasi wacana yang melibatkan penafsiran terhadap proses produksi teks oleh media dan konsumsi teks oleh khalayak (Aini, Burhanudin, & Saharudin, 2021). Dalam analisis dimensi kedua ini, perlu dilakukan investigasi mendalam tentang latar belakang penulis, wartawan, pemimpin media, dan orang-orang terlibat lainnya.

Dimensi ketiga merupakan tahap eksplanasi. Dalam dimensi ini, analisis dilakukan berdasarkan pada konteks sosial yang berada di luar media dan hal tersebut berdampak pada wacana yang muncul dalam media (Efendia & Mubayyamah, 2023). Praktik sosiokultural menggambarkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat membentuk dan menyebarkan ideologi dominan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis dimensi praktik sosiokultural dilakukan untuk memahami bagaimana faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang lebih luas dapat memengaruhi dan membentuk wacana yang muncul dalam media. Pembahasan praktik sosiokultural meliputi tiga aspek, yaitu konteks situasional, institusional, dan sosial (Mulyana, 2021: 57).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif kritis. Data penelitian ini berupa data lingual yang terdiri atas kosakata, modalitas, metafora, dan kalimat yang merepresentasikan sikap pejabat pemerintah pusat terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun. Sumber data penelitian ini berasal dari *kompas.com*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh atau menyalin teks berita dari laman

kompas.com yang terbit antara 15 Juni–31 Agustus 2023. Penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan dengan memilih sembilan berita. Setelah data berhasil dikumpulkan, bagian-bagian teks berita yang terindikasi merepresentasikan sikap pejabat pemerintah pusat selanjutnya ditandai.

Data yang telah ditandai tersebut kemudian diseleksi dan diurutkan sesuai dengan kebutuhan analisis data. Dalam mengurutkan data, penelitian ini menggunakan kode-kode tertentu berupa kode huruf B dan P serta kode angka-angka. Kode huruf B berarti berita dan kode huruf P berarti paragraf, sedangkan kode angka yang mengikuti kode huruf berarti urutan. Sebagai contoh, kode B1P1 berarti berita pertama pada paragraf pertama.

Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Analisis data dipaparkan menjadi tiga dimensi, yaitu analisis tekstual, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural. Aspek linguistik yang digunakan untuk analisis teks berupa kosakata, modalitas, metafora, dan kalimat. Analisis data pada dimensi kedua difokuskan pada proses produksi dan konsumsi teks. Adapun pada dimensi ketiga, analisis data difokuskan pada tiga konteks, yakni situasional, institusional, dan sosial. Langkah terakhir, hasil analisis data dijabarkan dengan metode informal berupa kalimat-kalimat biasa.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengungkap representasi sikap pejabat pemerintah pusat terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun. Analisis data penelitian ini dilakukan ke dalam tiga dimensi, yaitu analisis tekstual, praktik kewacanaan, dan praktik

sosiokultural. Berikut ini dijabarkan hasil analisis ketiga dimensi tersebut.

Analisis Tekstual

Dimensi pertama AWK model Fairclough adalah analisis teks. Pada dimensi ini, analisis dilakukan terhadap berbagai aspek linguistik yang merepresentasikan sikap pejabat pemerintah pusat. Representasi sikap tersebut diketahui melalui wujud kebahasaan berupa kosakata, modalitas, metafora, dan kalimat.

Wujud pertama representasi sikap pejabat pemerintah pusat ialah berupa kosakata. Kosakata yang digunakan *kompas.com* dalam merepresentasikan sikap pejabat pemerintah pusat ditunjukkan pada data berikut.

- (1) “Kita akan **tabayyun**, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum **tabayyun**,” ucap Zainut [B2P1]
- (2) Proses **musyawarah** dan **saling menasihati** dengan dasar kebenaran adalah solusi paling baik yang bisa dilakukan. [B2P2]
- (3) Zainut **meminta** agar Pesantren Al-Zaytun lebih terbuka dan kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog. [B2P3]
- (4) “Tetapi, pondok pesantrennya kita akan **evaluasi secara administratif**.” [B7P3]
- (5) Mahfud menambahkan, tindakan administrasi tersebut akan dilakukan dengan tetap menekankan pada pentingnya **memberi perlindungan** terhadap hak para santri dan murid yang belajar di ponpes itu. [B4P3]
- (6) Ia **menjamin** proses belajar mengajar bagi para santri tetap akan berjalan. [B5P2]

Data (1—3) di atas merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Saadi. Pada data (1), dia menyatakan bahwa pihaknya akan

mencari tabayun atau penjelasan. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi atau penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan atau membuat penilaian terhadap Ponpes Al Zaytun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak Kementerian Agama menganggap informasi yang beredar terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun sebagai informasi yang belum sepenuhnya benar sehingga perlu dilakukan tabayun. Dengan demikian, Zainut direpresentasikan memiliki sikap kehati-hatian dalam merespons kontroversi Ponpes Al Zaytun.

Selanjutnya, pada data (2), Zainut mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah dan saling menasihati sebagai solusi atas masalah di Al Zaytun. Pada data tersebut, *kompas.com* memberikan pernyataan yang menunjukkan sikap positif Wamenag terkait dengan pendekatan solusi terhadap suatu masalah. Data (3) Zainut memerintahkan Al Zaytun agar terbuka dan kooperatif. Dalam membahasakan hal tersebut, *kompas.com* menggunakan kata “meminta”. Penggunaan kata tersebut mencerminkan penghormatan terhadap otonomi Al Zaytun. Meskipun memiliki kekuasaan, Wamenag tidak menggunakan kata perintah yang terkesan represif, seperti kata “mengharuskan”, “mewajibkan”, “mendesak”, dan sebagainya.

Sikap positif berikutnya terhadap Al Zaytun dikemukakan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. *Kompas.com* merepresentasikan Mahfud dengan sikap yang lembut karena solusi yang diberikan sekadar sanksi administratif dan sikap pengayom. Hal itu dapat diketahui pada data (4—6). Pada data (4), pemerintah memilih untuk menangani masalah yang terjadi di Al Zaytun melalui prosedur administratif daripada langsung mengambil tindakan tegas atau

memberikan sanksi yang lebih berat. Pernyataan tersebut dapat menunjukkan sikap pemerintah yang lebih berhati-hati atau ingin memastikan bahwa semua prosedur hukum dan administratif diikuti sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Namun demikian, tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintah yang tidak tegas. Hal itu karena menurut penelitian MUI tahun 2002, Al Zaytun terbukti berafiliasi dengan ajaran sesat NII. Oleh sebab itu, Al Zaytun seharusnya tidak sekadar dievaluasi secara administratif. Dengan demikian, patut diduga pemerintah melindungi Al Zaytun dari hukuman pidana yang lebih berat.

Selanjutnya, pada data (5), pemerintah direpresentasikan memiliki sikap mengayomi atau melindungi para santri yang sedang belajar di Al Zaytun. Sikap tersebut dipertegas pada data (6), yaitu pemerintah memastikan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berlangsung di Al Zaytun. Pemerintah direpresentasikan dengan kosakata “menjamin”. Menurut KBBI, kata “menjamin” bermakna ‘menanggung keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya’. Melalui kosakata tersebut, *kompas.com* merepresentasikan pejabat pemerintah pusat memiliki sikap teguh dan bersungguh-sungguh dalam melindungi para santri Al Zaytun.

Wujud kedua representasi sikap pejabat pemerintah pusat ialah berupa modalitas. Modalitas yang digunakan *kompas.com* dalam merepresentasikan sikap pejabat pemerintah pusat ialah modalitas epistemik dan deontik. Data yang menunjukkan adanya dua macam modalitas tersebut dijabarkan sebagai berikut.

(7) Ma'ruf menuturkan, pemerintah **akan** mendengar dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai organisasi Islam. [B1P2]

(8) Zainut Tauhid Saadi mengatakan **akan** meminta klarifikasi secara langsung ke pengurus Pondok Pesantren Al-Zaytun. [B2P1]

(9) Ia juga menegaskan bahwa hingga kini pemerintah **belum** memutuskan untuk mencabut atau membekukan izin Pondok Pesantren Al Zaytun. [B8P3]

(10) Muhadjir pun menekankan, hingga saat ini **belum** ada indikasi pelanggaran yang bersifat institusional terkait kasus Ponpes Al Zaytun. [B9P2]

(11) “Karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang **harus** kita bina,” katanya lagi. [B7P3]

(12) “Sementara itu, institusinya (ponpes) **harus** tetap berjalan seperti biasa. ... **tidak boleh** terganggu oleh adanya seorang yang kena kasus itu,” jelas Muhadjir. [B9P2]

Data (7—8) di atas mengandung modalitas epistemik yang menunjukkan sikap kemungkinan. Hal itu ditandai dengan penggunaan kata “akan”. Modalitas “akan” mengindikasikan niat atau rencana untuk melakukan tindakan di masa yang akan datang. Pada data (7), pemerintah memiliki rencana di masa yang akan datang untuk mendengar dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai ormas Islam terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun. Pada data (8), Wamenag Zainut Tauhid Saadi memiliki rencana di masa yang akan datang untuk meminta klarifikasi secara langsung ke pengurus Al Zaytun terkait isu yang kontroversial. Melalui penggunaan modalitas “akan” pada dua data tersebut, pemerintah direpresentasikan dengan sikap tidak cekatan atau tidak tangkas. Hal itu karena pemerintah terkesan baru bertindak menangani Al Zaytun. Padahal kontroversi Al Zaytun sebenarnya tidak hanya terjadi baru-baru ini, melainkan telah berkali-kali terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Hanya saja,

kontroversi sebelumnya tidak viral hingga menggemparkan publik seperti yang terjadi pada 2023. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebelumnya pemerintah membiarkan dan tidak memperkarakan masalah Ponpes Al Zaytun.

Data (9—10) juga mengandung modalitas epistemik yang ditandai dengan kata “belum”. Menurut KBBI, kata “belum” bermakna ‘masih dalam keadaan tidak’. Pada data (9), Mahfud menegaskan bahwa pemerintah masih dalam keadaan tidak memutuskan untuk mencabut atau membekukan izin Al Zaytun. Selanjutnya, pada data (10), Muhadjir Effendy (Menko PMK) saat diwawancarai pada Selasa (18/7/2023) menyatakan bahwa pihaknya masih dalam keadaan tidak menemukan indikasi pelanggaran yang bersifat institusional sehingga Al Zaytun tidak dicabut atau dibekukan izinnya. Padahal ponpes tersebut telah beberapa kali diduga melakukan pelanggaran, di antaranya dugaan memecat 116 guru tidak sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku dan dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (Ramadhan, 2017); pelanggaran hak santri seperti dilarang ikut ujian nasional dan dikeluarkan secara sewenang-wenang (Setyawan, 2017); dugaan penyelewengan dana zakat (Rasmadi, 2023); dan sebagainya. Melalui modalitas “belum”, *kompas.com* merepresentasikan pejabat pemerintah pusat dengan sikap lamban atau tidak bersegera dalam menangani masalah Al Zaytun. Hal tersebut juga menimbulkan kesan ketidaktegasan pemerintah dalam menangani kasus di ponpes tersebut.

Data (11—12) mengandung modalitas deontik yang ditandai dengan kata “harus” dan “tidak boleh”. Menurut KBBI, kata “harus” berarti ‘wajib’ atau ‘tidak boleh tidak’, sedangkan kata “tidak boleh” berarti ‘tidak diizinkan’ atau

‘dilarang’. Pada data (11), Mahfud mengatakan bahwa Ponpes Al Zaytun wajib dibina oleh pemerintah. Pada data (12), Muhadjir mengatakan bahwa kegiatan di Ponpes Al Zaytun wajib tetap berjalan normal. Selanjutnya, pada data yang sama, Muhadjir juga mengatakan bahwa kegiatan di ponpes tersebut dilarang terganggu oleh penyidikan polisi atas kasus pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Melalui penggunaan modalitas tersebut, dapat diketahui bahwa *kompas.com* merepresentasikan pemerintah dengan sikap tegas dalam melindungi eksistensi Al Zaytun.

Wujud ketiga representasi sikap pejabat pemerintah pusat ialah berupa metafora. Metafora yang digunakan *kompas.com* dalam merepresentasikan sikap pejabat pemerintah pusat ditunjukkan pada data berikut.

(13) Selain itu, Zainut meminta agar semua pihak menahan diri untuk **main hakim sendiri**. [B2P1]

(14) Kementerian Agama (Kemenag) akan **membekukan** izin operasional pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun jika terbukti melakukan pelanggaran berat. [B3P1]

Pada data (13), frasa “main hakim sendiri” secara harfiah bermakna ‘memainkan peran sebagai seorang hakim’. Secara metaforis, frasa “main hakim sendiri” merujuk pada tindakan individu atau kelompok orang yang mengambil keputusan dan menghakimi suatu hal tanpa melibatkan proses klarifikasi secara langsung dari pihak terkait. Dalam hal ini, Wamenag Zainut Tauhid Saadi menegaskan pentingnya untuk tidak melakukan penghakiman atau mengambil keputusan sebelum dilakukan klarifikasi. Metafora tersebut mencerminkan sikap untuk tidak bertindak otoriter atau mengambil langkah-langkah tegas tanpa memahami konteks dan fakta yang sebenarnya terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun. Zainut

menekankan bahwa proses musyawarah dan mencari solusi bersama dengan dasar kebenaran merupakan pendekatan yang lebih baik dan lebih adil daripada main hakim sendiri yang dapat menciptakan konflik.

Pada data (14), kata “membekukan” secara harfiah bermakna ‘menjadikan beku’. Benda yang dapat dijadikan beku pada umumnya berupa benda cair seperti air. Pembekuan tersebut tidak bersifat permanen karena air yang dibekukan akan mencair dikarenakan adanya perubahan suhu. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa makna metafora “membekukan” pada konteks data tersebut merujuk pada suatu bentuk sanksi atau tindakan administratif yang bersifat pembatasan atau penghentian sementara terhadap kegiatan Ponpes Al Zaytun. Berdasarkan hal tersebut, *kompas.com* merepresentasikan pemerintah dengan sikap yang tidak tegas karena hanya melakukan perencanaan untuk membatasi atau menghentikan sementara aktivitas Ponpes Al Zaytun. Padahal banyak publik yang menginginkan ponpes tersebut dibubarkan karena berbagai masalah yang dilakukan oleh ponpes tersebut.

Wujud keempat representasi sikap pejabat pemerintah pusat ialah berupa kalimat. Kalimat yang digunakan *kompas.com* dalam merepresentasikan sikap pejabat pemerintah pusat pada umumnya berupa kalimat aktif dan hanya satu data yang berupa kalimat pasif. Hal itu dapat diketahui pada data berikut.

(15) “Al Zaytun itu suatu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus, anaknya pintar-pintar, sehingga kita akan selamatkan itu,” kata Mahfud. [B9P3]

(16) “Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma apa itu, kebangsaan itu berjalan di sana. Lagu Indonesia

Raya itu selalu dinyanyikan. Gitu,” ujar Moeldoko. [B6P2]

(17) Muhadjir Effendy mengatakan, kasus yang terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun menyangkut individu dan bukan lembaga. [B9P1]

(18) “Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang yang bernama Panji Gumilang itu, ini sudah ditangani,” kata Mahfud. [B8P1]

Pada data (15), pemerintah melalui Mahfud MD menyatakan pandangan yang positif terhadap Ponpes Al Zaytun. Dia menyatakan bahwa Al Zaytun sebagai suatu lembaga pendidikan yang mencetak santri-santri yang pintar. Pernyataan ini diucapkan dalam konteks keputusan atau langkah yang akan diambil oleh pemerintah terkait dengan Al Zaytun. Pernyataan positif tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan sisi kekurangan dan kelebihan Al Zaytun serta untuk mengubah persepsi negatif yang disematkan publik kepada ponpes tersebut. Melalui pernyataan tersebut, Mahfud MD menyiratkan bahwa Ponpes Al Zaytun dianggap memiliki kontribusi positif dalam pendidikan sehingga pihaknya (pemerintah) ada niatan untuk melindunginya dan tidak membubarkannya. Dengan demikian, *kompas.com* merepresentasikan pemerintah dengan sikap yang condong mendukung eksistensi Al Zaytun.

Dukungan terhadap Al Zaytun juga dapat diketahui pada data (16). Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan bahwa nilai-nilai kebangsaan dijalankan di Al Zaytun. Dia mencontohkan bahwa lagu kebangsaan “Indonesia Raya” selalu dinyanyikan di ponpes tersebut. Selain itu, pada berita yang lain, Moeldoko juga menyampaikan bahwa Pancasila selalu menjadi pembicaraan di Al Zaytun. Meskipun Al Zaytun telah dianggap buruk oleh publik karena ajarannya yang menyimpang,

Moeldoko justru memberi pandangan berbeda yang mengarah kepada pandangan positif terhadap Al Zaytun lantaran menjalankan nilai-nilai kebangsaan. Pandangan positif tersebut dapat ditafsirkan sebagai sikap mendukung keberadaan Al Zaytun.

Selanjutnya, pada data (17), Muhadjir Effendy mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Al Zaytun hanya dilakukan oleh individu, yakni Panji Gumilang, bukan dilakukan oleh institusional ponpes. Begitu pula pada data (18), Mahfud mengimbau agar publik tidak membesar-besarkan masalah yang terjadi di Al Zaytun. Dia mengatakan bahwa aktor utama masalah yang menimpa Al Zaytun hanya berasal dari satu individu yaitu Panji Gumilang. Oleh sebab itu, penanganan kasus diharapkan lebih difokuskan pada Panji tanpa menghambat atau mengganggu operasional lembaga pesantren secara umum.

Pernyataan Muhadjir dan Mahfud di atas terkesan mengecil-ngecilkan kasus yang terjadi di Al Zaytun. Hal itu karena kasus di Al Zaytun tidak hanya terjadi baru-baru ini yang menyangkut saf salat, khatib wanita, mazhab Soekarno, dan salam Yahudi. Kasus Al Zaytun juga berupa dugaan pelanggaran dan tindak pidana seperti yang telah dikemukakan di atas.

Berdasarkan hal tersebut, kasus yang terjadi di Al Zaytun tidak mungkin hanya dilakukan secara individual, tetapi patut diduga kuat dilakukan secara institusional. Dengan demikian, melalui berita tersebut, *kompas.com* merepresentasikan pemerintah dengan sikap membela dan melindungi Al Zaytun dengan cara mengecil-ngecilkan fakta kasus yang terjadi.

Praktik Kewacanaan

Dimensi kedua AWK model Fairclough adalah praktik kewacanaan. Analisis dimensi praktik kewacanaan dilakukan untuk memahami bagaimana interpretasi dan penggunaan teks dalam konteks sosial dan institusional yang lebih luas, sehingga dapat memengaruhi pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap wacana berita tentang sikap pejabat pemerintah pusat dalam menanggapi kontroversi Ponpes Al Zaytun. Terkait hal tersebut, poin penting yang perlu dicermati ialah a) latar belakang media yang memberitakannya, dan b) sistem tata kelolanya, yaitu cara memilih dan menyajikan beritanya.

Kompas.com merupakan salah satu situs web berita terkemuka di Indonesia yang menyediakan informasi terkini dan tepercaya kepada pembaca. Menurut survei *Reuters Institute* pada tahun 2023, *kompas.com* memiliki tingkat kepercayaan tertinggi di antara media massa daring lainnya. *Kompas.com* hanya menyediakan berita dan artikel versi daring dan mengandalkan pendapatan dari iklan. Media yang didirikan pada tahun 1995 itu menjadi bagian dari Kompas Gramedia Group (disingkat KG Group).

KG Group merupakan perusahaan Indonesia yang berfokus pada industri media massa yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Perusahaan tersebut berdiri pada 17 Agustus 1963 dan bermula dari penerbitan *Majalah Intisari* oleh P. K. Ojong dan Jakob Oetama. Pada beberapa waktu berikutnya, perusahaan tersebut semakin berkembang sehingga mendirikan beberapa surat kabar, salah satunya harian *Kompas*. Pada tahun 1965 dan 1978, *Kompas* pernah dilarang terbit oleh pemerintah. Dengan adanya intervensi dari penguasa dan pihak-pihak tertentu, media tersebut akhirnya

cenderung berorientasi pada bisnis dan ekonomi (Muthaqqin dkk., 2021).

Pada perkembangan selanjutnya, KG Group mengalami kendala dalam mendistribusikan harian *Kompas* ke seluruh Indonesia karena faktor geografis. Oleh sebab itu, *Kompas* mengambil langkah dengan menciptakan berita versi daring dari edisi cetaknya, yang dikenal sebagai *Kompas Online*. Awal kali peluncuran berita *Kompas Online* dilakukan pada 14 September 1995 melalui alamat *www.kompas.co.id*. Sejak awal tahun 1996, alamat situs web media tersebut diganti menjadi *www.kompas.com* hingga sekarang.

Kompas.com terus memberikan liputan mendalam terhadap berbagai isu, mencakup politik, ekonomi, budaya, dan beragam topik lainnya. Salah satu isu yang banyak diliput *kompas.com* ialah kontroversi Ponpes Al Zaytun. Media tersebut telah meliput kontroversi tersebut tidak kurang dari 240 teks berita sejak 15 Juni–31 Agustus 2023. Pemroduksian teks berita tersebut bertujuan untuk mempertahankan prestasinya sebagai situs web berita terkemuka di Indonesia yang menyediakan informasi terkini dan terpercaya kepada pembaca.

Berdasarkan banyaknya liputan tersebut, diketahui bahwa *kompas.com* memproduksi sebanyak 55 teks berita yang memberitakan sikap pejabat pemerintah pusat dalam menanggapi kontroversi ponpes tersebut. Narasumber yang diliput dari kalangan pejabat pemerintah berjumlah 9 orang, yaitu Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia), Ma'ruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia), Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia), Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama

Republik Indonesia), Zainut Tauhid Saadi (Wakil Menteri Agama Republik Indonesia), Moeldoko (Kepala Kantor Staf Kepresidenan), Anna Hasbie (Juru Bicara Kementerian Agama), dan Wiranto (Ketua Dewan Pertimbangan Presiden). Dari kesembilan narasumber tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, menjadi narasumber yang paling sering muncul dalam pemberitaan menyikapi kontroversi Ponpes Al Zaytun.

Sejumlah narasumber tersebut, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, konten pernyataan mereka memiliki kesamaan. Setelah ditelusuri dengan membaca berita secara cermat, narasumber-narasumber tersebut secara bersama-sama menyuarakan pendapat bahwa Ponpes Al Zaytun seharusnya tidak dibubarkan, melainkan cukup mengganti kepemimpinannya dan melakukan pembinaan terhadap pesantren tersebut. Para pejabat pemerintah pusat sepakat untuk menjaga hak belajar santri di Ponpes Al Zaytun agar tetap terjamin. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa *kompas.com* melalui praktik kewacanaannya bertujuan membentuk pandangan masyarakat bahwa Ponpes Al Zaytun tidak perlu dibubarkan, tetapi hanya perlu perbaikan dan pembinaan agar tidak menimbulkan kontroversi lebih lanjut.

Praktik Sosiokultural

Dimensi ketiga AWK model Fairclough ialah analisis praktik sosiokultural. Analisis pada dimensi ini didasarkan pada konteks yang terjadi di luar media, tetapi ikut berpengaruh pada wacana yang muncul dalam media. Konteks tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu konteks situasional, institusional, dan sosial.

Konteks pertama, yakni konteks situasional berkaitan dengan konteks keadaan atau peristiwa yang melatarbelakangi teks diproduksi. Terkait pemberitaan Al Zaytun oleh *kompas.com*, hal itu tidak lepas dari peristiwa kontroversial yang terjadi di dalam ponpes tersebut dan menjadi viral di media sosial sehingga menjadi perbincangan publik.

Kontroversi yang pertama terkait dengan pelaksanaan salat idulfitri 1444 Hijriah di Ponpes Al Zaytun pada 22 April 2023. Pelaksanaan salat tersebut didokumentasikan oleh pihak Al Zaytun dan diunggah ke akun instagram *@kepanitiaanalzaytun* pada tanggal yang sama. Dalam unggahan di media sosial tersebut, terlihat bahwa saf salat disusun dengan jarak yang renggang dan tampak jemaah perempuan berada di bagian paling depan yang bercampur baur dengan barisan laki-laki. Dokumentasi tersebut diperkuat oleh sebuah video yang diunggah di akun YouTube resmi Al Zaytun dengan judul *(AL-ZAYTUN) KHUTBAH IED AL FITHRI 1444 H*. Prosesi salat idulfitri yang tidak biasa tersebut akhirnya menjadi viral pada 24 April 2023 dan kemudian menuai kontroversi di kalangan warganet.

Kontroversi Ponpes Al Zaytun juga dikarenakan hal tidak biasa lainnya, seperti (a) adanya jemaah nonmuslim yang ikut salat idulfitri di Al Zaytun, (b) Al Zaytun hendak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, (c) gaya muazin yang tidak lazim. Panji Gumilang juga membuat pernyataan kontroversial, seperti (a) Al-Qur'an adalah karangan Nabi Muhammad Saw., (b) khatib salat Jumat boleh dari kalangan perempuan, (c) menyanyikan salam Yahudi *havenu shalom aleichem*. Di samping itu, dia juga mengaku bermazhab Soekarno dan menyebut Indonesia sebagai tanah suci (Musyafa', Ramadhani, & Fahmi, 2023).

Konteks kedua, yakni konteks institusional yang mempertimbangkan pengaruh institusi dalam praktik produksi wacana. Hal ini mencakup institusi internal media dan kekuatan eksternal yang memengaruhi produksi berita. Eriyanto (2006: 323) menyatakan bahwa faktor institusi internal media yang paling penting berhubungan dengan ekonomi media.

Kompas.com merupakan media daring yang mengandalkan pendapatannya pada iklan. Media tersebut telah memproduksi 240 teks berita dengan topik *Polemik Ponpes Al Zaytun* dalam kurun waktu 2,5 bulan, di mulai dari 15 Juni 2023 sampai 31 Agustus 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa *kompas.com* berambisi untuk meningkatkan jumlah produksi berita terkait Al Zaytun dengan tujuan agar lebih banyak orang membaca berita tersebut sehingga meningkatkan pendapatan dari iklan yang ditayangkan di situs webnya.

Institusi politik juga berpengaruh dalam praktik produksi wacana. Pada awal berdirinya, *Kompas* berafiliasi dengan partai Katolik, tetapi kini tidak lagi berafiliasi dengan partai politik manapun. Hal tersebut berbeda dengan pemilik media massa daring lainnya, seperti *detik.com*, *tvonenews.com*, *metrotvnews.com*, dan sebagainya yang berafiliasi dengan partai politik. Meskipun demikian, hasil tinjauan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Zainuddin dkk. (2021) mengungkapkan bahwa *kompas.com* cenderung merepresentasikan keberpihakan pada pasangan calon dan wakil calon presiden nomor urut 1 pada pemilu 2019, yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sementara, Joko Widodo pada saat itu menjadi presiden petahana. Berdasarkan temuan tersebut, patut diduga bahwa dalam memproduksi wacana terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun,

kompass.com dapat dianggap lebih mendukung atau berpihak kepada pemerintah. Kecenderungan *kompass.com* mendukung pemerintah juga dapat diketahui pada penelitian Suryawati & Jamalullail (2021). *Kompass.com* bersikap mendukung pemerintah terhadap pembubaran FPI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, wacana yang dihasilkan oleh *kompass.com* mengenai kontroversi Ponpes Al Zaytun sejalan dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah. Hal tersebut terbukti dari konstruksi realitas yang dilakukan *kompass.com* dalam memberitakan kontroversi Ponpes Al Zaytun. Strategi tersebut dilakukan *kompass.com* untuk mencari posisi aman dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Ponpes Al Zaytun agar tidak lagi diintervensi oleh penguasa jika memberitakan isu-isu sensitif seperti yang pernah terjadi pada 1965 dan 1978 silam. Di samping itu, *kompass.com* memberitakan kontroversi Ponpes Al Zaytun sebatas hanya dari sisi luarnya, tidak sampai membongkar lebih jauh terkait fakta lain di balik kontroversi tersebut. Temuan ini ternyata sejalan dengan studi terdahulu yang telah dilakukan oleh Muthaqqin dkk. (2021).

Konteks ketiga yakni konteks sosial juga sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. Konteks ini lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat secara keseluruhan. Terkait sikap pemerintah yang terkesan melindungi kasus Ponpes Al Zaytun, hal yang perlu dicermati dan dipahami ialah sejarah dan orang-orang di balik ponpes tersebut. Dengan mencermati hal tersebut, akan diketahui fakta lain di balik pemberitaan terkait kontroversi Al Zaytun.

Ponpes Al Zaytun yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berada

di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Ponpes tersebut didirikan pada 13 Agustus 1996 oleh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang. Meskipun demikian, pembelajaran pertama di ponpes tersebut baru dimulai pada 1 Juli 1999. Peresmian secara umum dilakukan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie. Al Zaytun pernah disebut *Washington Times* sebagai pesantren terbesar di Asia Tenggara. Pesantren ini berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar.

Pada perkembangannya, keberadaan ponpes tersebut dirasa tidak lazim oleh beberapa pihak. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia melakukan penelitian dan menemukan fakta bahwa Ponpes Al Zaytun melakukan penyimpangan dalam paham keagamaan. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Ponpes Al Zaytun terafiliasi dengan gerakan NII. Dalam program gelar wicara berita penting (*talkshow hardnews*) yang ditayangkan di TvOneNews (2023b), Pendiri *Indonesian Crime Analyst Forum*, Mustofa Nahrawardaya, mengatakan bahwa pada 2002, Kapolri Da'i Bachtiar, melabeli Ponpes Al Zaytun sebagai kelompok sesat, teroris, dan ekstremis. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kontroversi dugaan ajaran menyimpang di Ponpes Al Zaytun sebetulnya telah terjadi sejak 2 dekade silam. Anehnya, pemerintah baru memerkarakan ponpes tersebut pada tahun 2023.

Lambatnya pemerintah dalam menangani kasus Al Zaytun dikarenakan fakta lain di balik itu. Mustofa Nahrawardaya mengungkapkan bahwa ponpes tersebut dilindungi dan dijaga oleh intelijen. Dia mengatakan bahwa pada 2002, Abdullah Mahmud Hendropriyono (mantan Kepala Badan Intelijen Negara di Kabinet Gotong

Royong) pernah membuat pernyataan yang terkesan melindungi Al Zaytun.

Pendiri YPI, Imam Supriyanto juga mengatakan bahwa Al Zaytun dilindungi oleh kalangan elit dan juga dilindungi oleh seseorang yang dijuluki “Pak Kumis”, yakni Hendropriyono (*TvOneNews*, 2023b). Motif pihak-pihak yang melindungi Al Zaytun diungkapkan oleh mantan perekrut anggota NII, Sukanto (*Official iNews*, 2023). Sukanto mengatakan bahwa ada dua motif di balik mereka melindungi Al Zaytun, yaitu ekonomi dan politik.

Pada motif ekonomi, pihak-pihak yang melindungi Al Zaytun patut diduga mendapatkan sokongan dana dari Panji Gumilang. Sukanto mengatakan bahwa Panji Gumilang terlibat dalam gerakan NII KW IX dan Ponpes Al Zaytun merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh NII. Panji disebut mampu mengumpulkan uang sebesar 4 miliar rupiah hanya dalam 1 jam dengan memanfaatkan jaringan NII.

TvOneNews (2023a) memberitakan bahwa terdapat 256 rekening pribadi milik Panji Gumilang dan 30 rekening milik Ponpes Al Zaytun. Dalam pemberitaan itu, TV One mewawancarai mantan Anggota NII yang saat ini menjadi Analis Kajian Terorisme yaitu Al Chaidar. Chaidar mengatakan bahwa pada 1991, perolehan dana yang terkumpul dari anggota NII mencapai 4 miliar per bulan. Adapun pada saat ini, perolehan dana tersebut mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai 20—40 miliar per bulan.

Selain mendirikan Ponpes Al Zaytun, NII juga mendirikan beberapa yayasan, seperti yayasan yatim piatu dan yayasan duafa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Melalui yayasan tersebut, mereka membuka donasi dari masyarakat dalam berbagai cara, seperti meminta sumbangan di depan ATM, SPBU, dan halte bus, termasuk juga

meletakkan kotak amal di rumah makan dan minimarket. Imam Supriyanto mengatakan bahwa uang yang terkumpul dari donasi tersebut untuk satu yayasan saja mencapai 10 miliar per bulan. Oleh sebab itu, dana yang dimiliki oleh Al Zaytun dan Panji Gumilang jumlahnya sangat banyak. Patut diduga uang yang terkumpul tersebut juga mengalir ke tokoh elit sehingga sebagai balasannya, para tokoh elit tersebut melindungi eksistensi Al Zaytun.

Adapun Panji Gumilang yang saat ini dikasuskan sehingga menjadi tersangka pada kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana BOS Ponpes Al Zaytun, hal itu merupakan kejadian yang patut diduga telah direncanakan. Pengasuh Ponpes Abdurrahman bin Auf Cirebon, Irkham Fahmi mengatakan bahwa dia pada 2022 lalu pernah bertemu dengan seseorang yang menjadi pimpinan LSM besar. Dalam pertemuan itu, pimpinan LSM tersebut mengabarkan kepada Fahmi bahwa dalam waktu dekat dia berencana mengambil alih Ponpes Al Zaytun, termasuk menggantikan kepemimpinan Panji Gumilang di ponpes tersebut (Fahmi, 2023). Tujuannya ialah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari menguasai Al Zaytun. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya pihak-pihak yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Ponpes Al Zaytun pada Juni 2023 lalu. Mereka bukan berasal dari ormas Islam, melainkan berasal dari 13 LSM yang mengatasnamakan dirinya Forum Indramayu Menggugat (FIM).

Pada motif politik, patut diduga bahwa Al Zaytun menjadi tempat penggalangan masa untuk pemilu 2024. Dugaan tersebut diperkuat dengan peristiwa yang pernah terjadi pada pemilihan presiden 2004 silam. Pada tahun itu, dilaporkan telah terjadi mobilisasi massa dan penggelembungan suara di 83 TPS di Al Zaytun.

Diberitakan bahwa pada tahun 2004, ada sebanyak 4.962 penduduk yang tinggal di Ponpes Al Zaytun. Panji Gumilang kemudian menginstruksikan kepada semua pengikutnya yang ada di luar untuk mengikuti pilpres di dalam Al Zaytun. Jumlah massa yang datang ke Al Zaytun sebanyak 10.200 orang. Namun demikian, jumlah penggelembungan mencapai lebih dari 24.000.

Banyak saksi yang semula pengikut Panji Gumilang telah terbiasa memiliki 2—3 KTP. Melalui penggelembungan suara itu, diketahui bahwa pasangan capres-cawapres 2004 dari Partai Golkar, Wiranto dan Salahuddin Wahid, memperoleh 24.794 suara atau 99,8 persen di TPS Al Zaytun.

Ponpes Al Zaytun selama ini menjadi basis massa untuk kepentingan pemilu oleh partai politik. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengakui bahwa Partai Golkar dan juga partai politik lainnya melakukan penggalangan massa di Ponpes Al Zaytun (Antara News, 2011). Lebih lanjut, Chaidar menyebutkan bahwa dahulu jumlah jemaah Al Zaytun mencapai 14 juta, tetapi sekarang meningkat menjadi 40 juta (TvOneNews, 2023a). Dia juga menyebut bahwa ada dua partai politik yang memberikan kucuran dana kepada Panji Gumilang sebesar 80—100 miliar. Uang tersebut digunakan oleh Panji untuk membeli suara para jemaah Al Zaytun pada saat pemilu, dengan cara 20 juta jemaah diminta memilih partai yang satu dan 20 juta jemaah sisanya diminta memilih partai yang lain. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa pejabat pemerintah pusat patut diduga memandang Ponpes Al Zaytun memiliki potensi besar berupa banyaknya jumlah pemilih yang akan menyalurkan hak suara mereka saat pemilu.

PENUTUP

Berdasarkan analisis teks yang telah dilakukan, penelitian ini mengungkapkan bahwa representasi sikap pejabat pemerintah pusat dalam menanggapi kontroversi Ponpes Al Zaytun cenderung lamban dan tidak tegas. Sementara dalam membela dan melindungi eksistensi Ponpes Al Zaytun, pejabat pemerintah pusat direpresentasikan dengan sikap tegas. Diketahui juga bahwa praktik kewacanaan yang dilakukan *kompas.com* yaitu ingin membentuk pandangan masyarakat bahwa Ponpes Al Zaytun tidak perlu dibubarkan, tetapi hanya perlu perbaikan dan pembinaan agar tidak menimbulkan kontroversi lebih lanjut.

Pada dimensi analisis praktik sosiokultural, terdapat tiga temuan utama, yaitu (a) peliputan oleh *kompas.com* terhadap Ponpes Al Zaytun dipicu oleh pernyataan dan peristiwa kontroversial dari Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaytun yang menjadi viral, (b) *kompas.com* memproduksi banyak berita tentang kontroversi Al Zaytun untuk mendapatkan penghasilan iklan dan menciptakan wacana yang sejalan dengan narasi pemerintah guna mencari posisi aman, dan (c) lambatnya respons pejabat pemerintah pusat dalam menangani kasus Al Zaytun disebabkan oleh dugaan sokongan dana dari Panji Gumilang dan manuver politik terkait pemilu 2024. Dengan demikian, implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa media massa seperti *kompas.com* memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan mendukung narasi pemerintah. Oleh sebab itu, publik harus lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dari media massa karena media massa dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriana, G. U., & Yaqin, M. A. (2019). Analisis implementasi metode semantic similarity untuk pengukuran kemiripan makna antarkalimat. *Ilkomnika: Journal of Computer Science and Applied Informatics*, 1(2), 47–57. <https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v1i2.15>
- Ahmadi F, Y., & Mahardika, R. Y. (2019). Representasi aksi 212 di koran Sindo dan Media Indonesia. *Jurnal Kandai*, 15(1), 13–26. <https://doi.org/10.26499/jk.v15i1.728>
- Aini, J., Burhanudin, & Saharudin. (2021). Konstruksi perempuan dalam lagu-lagu berbahasa Sasak: Studi analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5(3), 524–532. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2196>
- Aji, E. N. W., Sudono, A., Sutarsih, & Utami, R. E. (2022). Kosakata dalam wacana alat peraga kampanye Pemilu 2019. *Jurnal Kandai*, 18(2), 233–245. <https://doi.org/10.26499/jk.v18i2.3599>
- Antara News. (2011). Golkar tinggalkan Al Zaytun jika terkait NII (Bambang, Ed.). Diambil 18 Januari 2024, dari Antaranews.com website: <https://www.antaranews.com/berita/256887/golkar-tinggalkan-al-zaytun-jika-terkait-nii>
- Cahyana, L. (2022). Konglomerasi media memperkuat hegemoni penguasa dan oligarki pada era New Media. *At-Tawasul: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.51192/ja.v2i1.352>
- Chaer, A. (2014). *Linguistik Umum* (4 ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendia, A. N., & Mubayyamah. (2023). Praktik sosial budaya pada berita daring Rencana DPR Mencetak Uang untuk Menanggulangi Dampak Covid-19. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 12(1), 138–151. <https://doi.org/10.26499/rnh.v12i1.2788>
- Eriyanto. (2006). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fahmi, I. (2023). Saya dan Pon-pest Al-Zaytun. Diambil 30 Desember 2023, dari Facebook website: <https://web.facebook.com/100075488195371/posts/285117387347866/?mibextid=cnaqHQgbhjpV4kkV&rdc=1&rdr>
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2 ed.). New York: Routledge.
- Febriyanti, A. R. L., & Suyudi, I. (2022). A critical discourse analysis of the Pantene Advertisement. *IJEAL: International Journal of English and Applied Linguistics*, 2(2), 332–341. <https://doi.org/10.47709/ijeal.v2i2.1683>
- Hidayat, R., Chatra, E., & Arif, E. (2020). Implikasi uji kompetensi wartawan terhadap profesionalitas (Studi fenomenologis terhadap wartawan bersertifikasi dalam mewujudkan profesionalisme dan keberimbangan produk jurnalistik). *AL-HKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial, dan Budaya*, 11(2), 68–79. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i2.2542>

- Kulup, L. I., Yulianto, B., & Yohanes, B. (2021). Modalitas epistemik sebagai wujud lingual tuturan berpagar mahasiswa multikultural di Surabaya. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 10(2), 254–269. <https://doi.org/10.26499/rnh/v10i2.4044>
- Mulyana. (2021). *Metodologi penelitian wacana: Panduan aplikatif penelitian wacana* (1 ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyana, A. P., & Irfan, M. (2021). Bentuk pertarungan wacana ideologi media massa menjelang pemilihan presiden. *Jurnal Akrab Juara*, 6(2), 326–340. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i2.1475>
- Musyafa', M. I., Ramadhani, N. S., & Fahmi, S. D. (2023). Penyimpangan ajaran Ma'had Al-Zaytun terhadap hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)*, 2(1), 209–217. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v2i1.1309>
- Muthaqqin, F., Syam, H. M., & Wahyuni, P. (2021). Ideologi media dan framing pada pemberitaan perusakan rumah ibadah di Kompas dan Republika. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 63–82.
- Novelly, Y., Madya, S. A., & Manaf, N. A. (2021). Representasi pejabat pemerintah terhadap kebijakan *lockdown* pada tayangan ILC TV One. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 10(1), 59–72. <https://doi.org/10.26499/rnh.v10i1.3488>
- Nurjannah, & Sonni, A. F. (2021). Konstruksi pemberitaan kepala daerah di Kota Makassar terkait Covid-19. *Jurnal Warta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 4(1), 17–26.
- Official iNews. (2023). Menguak dari mana semua uang kekayaan Panji Gumilang yang Ia dapatkan. Diambil 30 Desember 2023, dari Youtube website: <https://www.youtube.com/watch?v=n492ZBsqiGy>
- Prayogi, I., & Oktavianti, I. N. (2020). Mengenal metafora dan metafora konseptual. *Jurnal Sasindo: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 45–70.
- Ramadhan, B. (2017). FSGI: Ada 10 pelanggaran dalam pemecatan guru di Al Zaytun. Diambil 23 Desember 2023, dari Republika.co.id website: <https://news.republika.co.id/berita/okycs4330/fsgi-ada-10-pelanggaran-dalam-pemecatan-guru-di-al-zaytun>
- Rasmadi, S. (2023). Laporan pelanggaran zakat Al-Zaytun dilimpahkan ke Bareskrim. Diambil 23 Desember 2023, dari Detik.com website: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6840204/laporan-pelanggaran-zakat-al-zaytun-dilimpahkan-ke-bareskrim>
- Romadlan, S., & Fauziah, I. (2022). Konstruksi realitas media online mengenai kekerasan aparat kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 26(1), 53–70. <https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4954>

- Sakka, S. bin, Nurhadi, & Sari, E. S. (2023). Analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk pada pidato presiden di KTT Ke-42 ASEAN. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3(2), 93–102. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v3i2.2237>
- Santuso, S., Wibisono, B., & Sukarno, S. (2023). Islamophobia in the reporting of Siti Elina in Tempo.co: a critical discourse analysis study. *IJEAL: International Journal of English and Applied Linguistics*, 3(1), 50–60. <https://doi.org/10.47709/ijeal.v3i1.2178>
- Saumantri, T., & Zikrillah, A. (2020). Teori Simulacra Jean Baudrillard dalam dunia komunikasi media massa. *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 11(2), 247–259. <https://doi.org/10.24235/orasi.v11i2.7177>
- Setyawan, D. (2017). KPAI terima 4 pelaporan pelanggaran hak santri Pesantren Al Zaytun. Diambil 23 Desember 2023, dari kpai.go.id website: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-terima-4-laporan-pelanggaran-hak-santri-pesantren-al-zaytun>
- Silfia, I., & Kurniawan, R. (2022). Stigma media terhadap fandom perempuan dalam pemberitaan penggemar K-Pop. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art1>
- Supriadi, Simanihuruk, B., & Yusrah. (2020). Analisis wacana kritis pidato Nadiem Makarim 2019. *Jurnal Sintaksis: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris*, 2(2), 71–78.
- Suryawati, I., & Jamalullail. (2021). Analisis wacana kritis terhadap berita pembubaran front pembela Islam di Kompas.com. *Jurnal Komunikatif*, 10(1), 38–52. <https://doi.org/10.33508/jk.v10i1.3040>
- TvOneNews. (2023a). Al Chaidar bongkar cara Panji Gumilang dapatkan ratusan rekening dan mendapat dana miliaran. Diambil 18 Januari 2024, dari YouTube website: https://www.youtube.com/watch?v=zJH3U_HYvk8
- TvOneNews. (2023b). Menguak misteri ajaran menyimpang Ponpes Al Zaytun. Diambil 30 Desember 2023, dari Youtube website: <https://www.youtube.com/watch?v=xFRZVe65aV8>
- Wicaksono, A., Roza, A. S., Syaefudin, M., Yunita, W., Nurhasanah, Hartati, Y. S., ... Ryeo, P. J. (2018). *Tentang sastra: Orkestrasi teori dan pembelajarannya* (Emzir, S. Rohman, & A. Wicaksono, Ed.). Yogyakarta: Garudhawaca.
- Wilson, A., & Sutrisno. (2022). Efektifitas aplikasi Cake terhadap kemampuan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 263–270. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.12093>
- Wiryo, S. (2023). Pemerintah diminta hati-hati sikapi kontroversi Ponpes Al Zaytun. Diambil 24 Juli 2023, dari Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/21/13142231/pemerintah-diminta-hati-hati-sikapi-kontroversi-ponpes-al-zaytun>

Zainuddin, I., Darwis, M., & Iswary, E. (2021). Representasi ideologi di balik wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam media Kompas: Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Ilmu Budaya*, 9(2), 133–143. <https://doi.org/10.34050/jib.v9i2.14696>